

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Rerangka Teori

1. Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* merupakan teori yang umum digunakan dalam ranah sektor publik, karena dalam teori *stewardship* manajer berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika ada perbedaan kepentingan, *steward* selaku manajer akan mematuhi daripada menentangnya, karena hal tersebut dianggap lebih rasional untuk mencapai tujuan organisasi. Teori *stewardship* menganggap bahwa hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. *Steward* mencoba untuk memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan (Raharjo, 2007).

Teori *stewardship* berpendapat bahwa kinerja *steward* dipengaruhi situasi struktural dimana dia sebagai fasilitator yang efektif. Jika pelaksanaan sesuai dengan model yang mendasari teori *stewardship*, pemberdayaan struktur dan mekanisme pemerintahan dianggap tepat. Dengan demikian, kemandirian *steward* harus diperluas untuk dimaksimalkan manfaatnya dari seorang *steward*, karena seharusnya dia dapat dipercaya. Dalam hal ini, sumber daya yang diperlukan untuk menjamin perilaku pro-organisasi dari agen individual yaitu, pemantauan dan insentif serta biaya ikatan berkurang, karena *steward* termotivasi untuk berperilaku konsisten demi tujuan organisasi (Davis dkk, 1997).

2. Teori Agensi

Agensi teori menjelaskan mengenai hubungan antara prinsipal (pemilik saham) dan agen (manager) yang mana prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk mengelola kekayaan prinsipal. Prinsipal mendelegasikan tanggungjawab pengambilan keputusan kepada agen yang mana hak dan kewajiban kedua belah pihak diuraikan dalam suatu perjanjian yang saling menguntungkan. Hubungan antara principal dan agen memiliki tujuan untuk mendapatkan sebanyak mungkin utilitas dengan pengeluaran terakhir yang digunakan.

Sebagai agen, secara moral bertanggungjawab memaksimalkan utilitas prinsipal. Pada perusahaan, agen dan principal dimotivasi oleh kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Prinsipal menginvestasikan kekayaannya dan mendesain sistem yang kuat untuk memaksimalkan kekayaannya. Kemudian agen memiliki kesempatan untuk mengelola investasi prinsipal, karena dianggap bahwa agen memiliki perolehan utilitas yang lebih besar.

Apabila agen dan principal memiliki kepentingan yang sesuai, maka tidak ada masalah antara keduanya dan mereka akan menerima kenaikan utilitas individualnya. Namun, jika terjadi perbedaan kepentingan antara principal dan agenn maka akan terjadi *cost of agency*. Terdapat dua skema kompensasi eksekutif dan dua struktur yang kuat. Skema insentif yang kuat menyediakan *reward* dan *punishment* yang bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan agen dan prinsipal. Apabila agen menerima kompensasi yang menjadi subjek

kesuksesan tujuan principal maka agen akan termotivasi untuk berperilaku untuk menaikan kekayaan dari prinsipal. Mekanisme kedua, yaitu struktur yang kuat memiliki tujuan untuk membawa prilaku agen agar selaras dengan kepentingan prinsipal. Biaya agensi selalu diawasi oleh dewan yang kemudian nanti akan disampaikan keprinsipal.

Mekanisme pengawasan yang kuat ditentukan untuk mengasumsikan bahwa kepentingan agen dan prinsipal dapat berbeda dan agen memiliki peluang untuk memaksimalkan utilitas individualnya pada biaya agensi (Anton, 2010).

3. Faktor-faktor yang membedakan teori agensi dan teori *stewardship*

Terdapat dua faktor yang membedakan teori agensi dan teori *stewardship*, yaitu faktor psikologi dan faktor situasi.

a. Faktor Psikologi

1) Motivasi

Fokus utama pada teori agensi dan teori *stewardship* adalah pada motivasi intristik atau ekstristik. Pada teori *stewardship* lebih berfokus pada motivasi instristik yaitu berupa penghargaan yang tidak mudah diubah. Penghargaan ini merupakan kesempatan untuk meningkatkan pertumbuhan, prestasi, asoasiai dan aktualisasi diri (Anton, 2010). Sedangkan untuk teori agensi sendiri lebih berfokus pada motivasi ekstrinsik yaitu dilihat dari komoditi yang dapat ditukarkan dan mempunyai ukuran nilai pasar. Pada teori agensi motivasi ekstrinsik

didasarkan pada penghargaan yang menunjukkan mekanisme pengendalian.

Menurut Hockman dan Oldhan dalam Anton (2010) mengatakan bahwa terdapat tiga keadaan yang bersifat psikologi yaitu pengalaman memahami pekerjaan, pengalaman bertanggungjawab atas hasil, dan pemahaman atas hubungan nyata. Untuk mencapai fasilitas yang layak maka pekerjaan perlu diperbaharui kembali untuk menambahkan keanekaragaman, keahlian, identifikasi tugas yang sesuai, kemandirian. Semua unsur tersebut berhubungan untuk menambah kesempatan berkembang dan bertanggungjawab dari pekerjaan, model ini konsisten dengan asumsi bahwa teori *stewardship* menambah motivasi kerja internal dan berperan penting untuk meningkatkan tingkat kinerja yang sama baiknya dengan kepuasan kerja.

2) Identifikasi

Bagian identifikasi terjadi yang mana manajer menetapkan sendiri dirinya sebagai anggota dalam organisasi dan menjalankan misi, visi, dan tujuan organisasi. Identifikasi memungkinkan manajer seolah-olah memperoleh penghargaan untuk kesuksesan organisasi. Manajer yang diidentifikasi dengan atribut organisasi dan kesuksesan organisasi atribut ini memberikan kontribusi pada *self-image* dan *self concept*. Hal ini menjelaskan bahwa identifikasi sosial konsisten dengan teori *stewardship*. Sedangkan pada teori agensi nilai komitmen tidak memiliki

nilai ekonomis dan tidak relevan sebagai perubahan persetujuan, karena teori agensi selalu mementingkan keuntungan individu disbanding keuntungan Bersama.

3) Penggunaan Kekuasaan

Kekuasaan merupakan aspek penting mengenai hubungan prinsipal dan agen. Agen menerima kepuasan dari motivasi dengan menggunakan kekuasaan. Menurut Mc Celland dan Burham dalam Anton (2010), motif kekuasaan merupakan upaya yang digunakan untuk meningkatkan prestasi dan dapat mendukung tujuan organisasi. Keahlian dan kelebihan kekuasaan adalah salah satu karakteristik personal power, yang mana kelebihan individu dalam bekerja akan dibandingkan dengan individu lainnya. Kekuatan personal adalah dasar yang mempengaruhi rasa tanggungjawab hubungan dengan prinsipal.

b. Faktor Situasional

1) Filosofi Manajemen

Argyris dalam Raharjo (2007) mengatakan bahwa filosofi manajemen sebuah organisasi didasari pada asumsi ekonomis dan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri yang menghasilkan perilaku yang konsisten dengan asumsi. Jika pernyataan ini benar, maka evolusi manajemen yang berorientasi memiliki keterlibatan dalam organisasi lebih didominasi dalam model yang mengarah pada timbulnya perilaku konsisten dengan teori *stewardship*.

2) Budaya

Paham mengenai individual-kolektif adalah aspek budaya yang berpengaruh dalam menentukan pilihan hubungan antara agen dan *stewardship*. Paham individual memiliki karakteristik yang tujuannya personal diluar tujuan organisasi. Sedangkan paham kolektif ditekankan pada tujuan personal dengan tujuan kolektif. Budaya kolektif adalah seseorang dari suatu grup misalnya keluarga, iniversitas, dan organisasi. Sikap individual melihat pertentangan sebagai kesempatan untuk melakukan pekerjaan dan komunikasi secara langsung, memiliki orientasi jangka pendek, tingkah laku bisnis tidak bergantung pada hubungan personal, dan memakai analisis *cost benefit* untuk mengevaluasi bisnis dan mengurangi resiko pada kontrak bisnis.

3) Rentang Kekuasaan

Dalam budaya yang pasti, terdapat perbedaan antara anggota yang lebih besar, akan tetapi mereka memiliki sikap toleran terhadap perbedaan tersebut. Budaya rentang kekuasaan yang tinggi cocok digunakan untuk mengembangkan hubungan keagenan karna budaya ini mendukung dan melegitimasi ketidaksamaan inherent antara prinsipal dan agen. Kemudian budaya rentang kekuasaan rendah cocok digunakan untuk mengembangkan jiwa *leadership* karena setiap anggota menempatkan nilai yang lebih besar pada kesetaraan dari suatu yang esensial pada prinsipal dan agen.

4. Teori COSO

Teori COSO (*Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission*) menerbitkan mengenai *Internal Control-Integrated Framework* yang telah diupdate pada tahun 2013 yang mengartikan bahwa internal control atau pengendalian internal merupakan suatu proses yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen, dan lainnya dari entitas, yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan.

Teori COSO dirancang untuk digunakan oleh organisasi untuk menilai efektifitas sistem pengendalian internal untuk mencapai tujuan yang ditentukan oleh manajemen. Terdapat 5 (lima) komponen sebagai kebijakan dan prosedur yang telah dirancang serta digunakan untuk menjadikan perusahaan atau organisasi memiliki pengendalian yang efektif dan efisien. Berikut merupakan lima komponen pengendalian internal menurut teori COSO:

a. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian dalam pengendalian internal sangat penting peranannya, karena lingkungan pengendalian merupakan serangkaian standar, proses, dan struktur yang menyediakan dasar untuk melakukan control internal diseluruh organisasi. Dewan direksi dan manajemen senior menetapkan hal diatas mengenai pentingnya pengendalian internal dan standar perilaku yang diharapkan. Contoh

lingkungan pengendalian adalah pemberian dan pemisahan fungsi wewenang dan tanggungjawab, *job description*, dan kebijakan sumber daya manusia seperti pelatihan dan kompetensi.

b. Penilaian Resiko (*Risk Assessment*)

Penilaian resiko merupakan sesuatu yang dinamis dan proses iteratif untuk mengidentifikasi, menganalisis resiko dan mengelola berbagai resiko yang dimaksudkan untuk mengatasi resiko-resiko secara efektif dan efisien yang dapat menghambat pencapaian tujuan suatu organisasi. Contohnya adalah penggunaan *key performance indicator* (KPI), survei kepuasan *customer*, dan *balance score card* (BSC).

c. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian merupakan komponen pengendalian internal yang meliputi mengenai kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk membantu memberikan keyakinan bahwa semua arahan telah dilaksanakan sesuai dengan pimpinan suatu instansi/lembaga secara efektif dan efisien. Contoh aktivitas pengendalian adalah perancangan dan penggunaan dokumen/catatan yang memadai, dilakukannya pengecekan secara independen, dan lain-lain.

d. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Informasi dan komunikasi merupakan salah satu komponen pengendalian internal yang bertujuan untuk memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan secara cepat dan tepat guna menunjang kegiatan

operasional disuatu instansi/lembaga sehingga dapat membantu pimpinan di instansi/lembaga tersebut dalam melaksanakan tanggungjawabnya untuk melakukan pengendalian. Contohnya adalah rekonsiliasi, *protect user-ID* dan *password* dan verifikasi tandatangan atas penarikan cek.

e. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan dalam pengendalian internal memiliki tujuan untuk menilai kualitas dan efektifitas dari sistem pengendalian internal, serta melakukan pembaharuan sistem pengendalian internal apabila diperlukan. Contohnya adalah mengevaluasi atau menindaklanjuti hasil audit dan reuiu, penilaian kinerja karyawan dan pengujian efektifitas sistem pengendalian internal (Saleba, 2014).

5. Sumber Daya Manusia

Menurut Kiranayati dan Erawati (2016) sumber daya manusia adalah seorang atau individu yang mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sumber daya manusia sangat penting peranannya dalam proses penyusunan laporan keuangan untuk mencapai hasil laporan yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkaitan dengan sistem diwajibkan untuk memiliki keahlian akuntansi yang memadai atau harus memiliki kemauan untuk terus belajar dan menambah keahlian dibidang akuntansi. Menurut Danies Thompson dalam buku yang ditulis oleh Robbins dan Coulter (2010) kualitas dari organisasi bergantung pada orang-orang yang ada didalamnya. Mendapatkan dan mempertahankan karyawan yang kompeten sangat penting bagi kesuksesan

organisasi, baik organisasi yang baru berdiri ataupun organisasi yang sudah berdiri bertahun-tahun. Sumber daya manusia merupakan suatu elemen yang penting bagi organisasi, maka dari itu sumber daya manusia harus bisa memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan organisasi (Suwanda, 2015).

6. Sistem Pengendalian Internal

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, mengartikan sistem pengendalian internal sebagai suatu proses integral yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melakukan kegiatan organisasi yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Ada beberapa unsur dalam Sistem pengendalian internal pemerintah, unsur tersebut antara lain:

a. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah sesuatu yang menjadi standar, proses, dan struktur yang menjadi dasar dalam control internal yang akan dilakukan didalam organisasi.

b. Penilaian resiko

Penilaian resiko adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis resiko dan mengelola berbagai resiko yang dimaksudkan untuk mengatasi resiko-resiko secara efektif dan efisien yang dapat menghambat pencapaian tujuan suatu organisasi.

c. Aktivitas pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah komponen pengendalian internal yang meliputi kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memberikan keyakinan bahwa semua arahan telah dilaksanakan sesuai dengan pimpinan suatu instansi/lembaga secara efektif dan efisien

d. Informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan secara cepat dan tepat guna menunjang kegiatan operasional disuatu instansi/lembaga sehingga dapat membantu pimpinan di instansi/lembaga tersebut dalam melaksanakan tanggungjawabnya untuk melakukan pengendalian.

e. Pemantauan

Pemantauan dalam pengendalian internal bertujuan untuk menilai kualitas dan efektifitas dari sistem pengendalian internal, serta melakukan pembaharuan sistem pengendalian internal apabila diperlukan.

Menurut Pratolo (2016) suatu perencanaan yang meliputi sutruktur organisasi, metode, dan alat-alat yang dikordinasikan yang digunakan dalam organisasi dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik organisasi, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong kepatuhan pada kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Adapun sasaran dari pengendalian internal antara lain; (1) mendukung operasi perusahaan yang efektif dan efisien; (2) laporan keuangan yang handal dan akuntabel; (3) perlindungan asset; (4) mengecek kehandalan

serta keakuratan data akuntansi; (4) kesediaan ketaatan peraturan yang berlaku; (5) membantu kebijakan managerial.

7. Penggunaan Sistem Keuangan Desa

Aplikasi sistem keuangan Desa (SISKEUDES) adalah aplikasi yang dibuat dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur dalam aplikasi SISKEUDES dibuat sesederhana mungkin sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES. Proses penginputan data sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan yang sesuai dengan peraturan undang-undang, adapun penginputan data yang dibuat di aplikasi SISKEUDES, antara lain; dokumen penatausahaan, bukti penerimaan, surat permintaan pembayaran, surat setoran pajak, laporan penganggaran (APBDesa, RAB), dan laporan penatausahaan (buku kas umum, buku pajak, buku bank, buku pembantu, dan register) (Lusiono dan Suharman, 2017). Penerapan SISKEUDES diharapkan dapat membantu pekerjaan kepala desa dan pegawai desa, sehingga kinerja menjadi lebih baik dan penggunaan aplikasi bisa lebih efektif. Penggunaan aplikasi SISKEUDES yang kurang efektif berdampak buruk bagi kinerja dan mutu pelayanan desa pada masyarakat (Sulina, 2017).

8. Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan dibuat untuk pengambilan keputusan, sehingga setiap laporan keuangan yang dibuat harus memenuhi kriteria atau sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan agar laporan keuangan memiliki kualitas

yang baik, serta dapat dipercaya keakuratannya. Menurut Chen, dkk, (2010) laporan keuangan memberikan informasi sebenar-benarnya mengenai kinerja dan posisi keuangan dari suatu organisasi. Lain lagi menurut Van Beest dkk (2009) yang menyebutkan bahwa laporan keuangan yang berkualitas dapat dilihat dari dua perspektif yaitu, pertama, perspektif kebutuhan pengguna yang mana kualitas laporan keuangan diukur dari kebergunaan informasi yang dihasilkan bagi penggunanya. Untuk mengukur kebergunaan informasi yang dihasilkan maka laporan keuangan harus disajikan dengan informasi yang relevan. Kedua, perspektif dari perlindungan *stock/shareholder*, yang mana kualitas laporan keuangan diukur dari kecukupan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna, serta informasi tersebut transparan dan kompeten.

a. Karakteristik Utama Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa kualitas laporan keuangan harus memiliki empat karakteristik utama, yaitu:

1) Relevan

Terkait dengan maksud penggunaannya, yaitu untuk membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan atau mengoreksi hasil evaluasi masa lalu.

2) Andal

Terkait dengan perlindungan *stock/shareholder* dengan menyajikan setiap fakta dengan jujur dan dapat disertifikasi atau dapat dipertanggungjawabkan.

3) Mudah dipahami

Informasi laporan keuangan harus memiliki penjelasan yang cukup, tidak membuat bingung pengguna dan kata yang digunakan tidak ambigu

4) Dapat dibandingkan

Bahwa laporan keuangan hendaknya harus dapat dibandingkan dengan laporan lain yang setara dan juga laporan keuangan pada periode sebelumnya (Bondan dkk, 2017).

b. Unsur-unsur laporan keuangan

Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan CaLK, laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA, dan laporan perubahan SAL, dan laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LAK, dan LPE. CaLK merupakan laporan yang menjelaskan mengenai pos-pos laporan keuangan dalam pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak dapat dipisahkan dari laporan anggaran maupun laporan finansial.

1) Laporan Realisasi Anggaran

Menyajikan mengenai ikhtisar sumber, alokasi dan opemakaian sumber daya keuangan yang sudah dikelola oleh pemerintahan kemudian dapat dibandingkan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Adapun unsur-unsur dalam laporan pelaksanaan anggaran adalah:

- (1) Pendapatan/LRA merupakan penerimaan oleh bendahara umum negara/daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang akan membah

saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan kemudian menjadi hak pemerintah tanpa harus dibayar kembali oleh pemerintah.

- (2) Belanja merupakan pengeluaran bendahara umum negara/daerah atau entitas lainnya yang mengurangi saldi anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- (3) Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang oleh entitas pelaporan kepada entitas lain termasuk untuk dana bagi hasil dan dana perimbangan.
- (4) Pembiayaan merupakan setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan entitas yang perlu dibayarkan kembali atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi mengenai kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan kemudian akan dibandingkan dengan laporan SAL tahun sebelumnya.

(1) Neraca

Neraca menggambarkan mengenai posisi keuangan dari entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas.

(2) Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan mengenai ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah pusat atau daerah dalam satu periode pelaporan.

Unsur-unsur yang mencakup laporan operasional dijelaskan sebagai berikut:

- (a) Pendapatan-LO merupakan hal pemerintah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan.
- (b) Beban merupakan kewajiban pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan.
- (c) Transfer merupakan hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas lain, termasuk dana bagi hasil dan dana perimbangan.
- (d) Pos luar biasa merupakan pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena adanya kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan diluar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan.

(3) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas digunakan untuk menyajikan informasi mengenai kas sehubungan dengan operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan mengenai saldo awal, penerimaan,

pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama satu periode tertentu.

(a) Penerimaan kas merupakan semua aliran kas yang masuk ke bendahara umum negara atau daerah.

(b) Pengeluaran kas merupakan semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum negara atau daerah.

(4) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan mengenai informasi kenaikan dan penurunan ekuitas tahun laporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian mengenai angka yang ada dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan arus kas, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup mengenai informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh suatu entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam standar akuntansi pemerintahan serta diungkapkan mengenai hasil penyajian laporan keuangan secara wajar. Adapun hal yang disajikan atau diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

(1) Mengungkapkan informasi mengenai entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

- (2) Menyajikan informasi mengenai kebijakan fiscal atau keuangan dan ekonomi makro.
- (3) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama setahun pelaporan dengan mencantumkan kendala dan hambatan dalam mencapai target yang ditentukan.
- (4) Menyajikan informasi mengenai dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih kemudian diterapkan berdasarkan transaksi dan kejadian yang penting lainnya.
- (5) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- (6) Mengungkapkan informasi mengenai apa yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- (7) Menyediakan informasi yang diperlukan lainnya ketika diperlukan guna untuk menyajikan laporan keuangan yang wajar dalam muka laporan keuangan.

B. Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan desa

Sumber daya manusia dianggap perlu memahami dan menerapkan ilmu akuntansi agar laporan yang dibuat lebih berkualitas dan dapat dipercaya, sehingga sumber daya manusia yang direkrut oleh perusahaan atau organisasi hendaknya memiliki kompetensi dan kemampuan menaati peraturan yang

ada. Oleh sebab itu, semakin baik sumber daya manusia maka semakin baik kualitas laporan keuangan yang disajikan.

Sumber daya manusia yang memiliki kegagalan dalam memahami dan menerapkan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi. Hal ini akan memicu terjadinya kekeliruan pada laporan keuangan yang telah sesuai dengan SAP, kemudian akan menyebabkan laporan keuangan menjadi buruk. Apabila laporan keuangan yang dibuat banyak terdapat kesalahan, maka akan menurunkan tingkat kredibilitas laporan keuangan tersebut dan informasi yang disajikan tidak handal (Soimah, 2014).

Adapun penelitian sebelumnya yang mendukung pernyataan diatas adalah penelitian yang dilakukan oleh Darwanis dan Mahyani (2009) kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap peningkatan keterandalan pelaporan keuangan pemerintahan daerah secara parsial. Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan (Mahaputra dan Putra, 2014). Penelitian Kiranayanti dan Erawati (2016) menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia, maka semakin tinggi pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan. Kemudian penelitian dari Lasmara dan Rahayu (2016) yang menyimpulkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, artinya apabila

kompetensi sumber daya manusia dilaksanakan dengan baik maka akan tercapai kualitas laporan keuangan. Sehingga penurunan hipotesis yang diajukan adalah:

H₁: Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Desa.

2. Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Desa

Sistem pengendalian internal diterapkan oleh organisasi maupun perusahaan guna untuk menjadi alat manajemen yang berguna untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Sistem akuntansi sangat rentan dengan adanya kekeliruan dalam pencatatan maupun perhitungan dan penyimpangan lain yang bertujuan untuk merugikan organisasi. Dengan adanya sistem pengendalian internal diharapkan dapat memproses transaksi akuntansi secara teliti dan meminimalkan resiko kekeliruan dan kesalahan.

Menurut penelitian Darwanis dan Mahyani (2009) secara parsial pengendalian internal akuntansi berpengaruh terhadap peningkatan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Yudianta dan Erawati (2012) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi. Kemudian menurut penelitian dari Mahaputra dan Putra (2014) menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah. Penelitian tersebut juga didukung oleh Kiranayanti dan Erawati (2016) yang menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal

berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut menandakan semakin tinggi penerapan sistem pengendalian internal, maka semakin tinggi penaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan. Begitu juga dengan penelitian Siwambudi, dkk (2017) bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klungkung. Oleh karena itu hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₂ : Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa.

3. Efektifitas penggunaan sistem keuangan Desa (SISKEUDES) terhadap kualitas laporan keuangan desa

Sistem informasi akuntansi desa sangat penting untuk keberlangsungan proses pencatatan di desa. Sistem informasi akuntansi terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu (SISKEUDES) dianggap sebagai aplikasi yang efektif bagi kepala desa dan aparatnnya untuk melakukan pengelolaan keuangan yang kemudian menjadi laporan keuangan desa. Sistem keuangan desa dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi standar laporan keuangan. SISKEUDES dibuat untuk mendukung implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, yang mana SISKEUDES dapat membuat laporan keuangan desa lebih akurat dan pembuatan anggaran desa tepat waktu, agar pencairan dari pusat juga tepat waktu. Kemudian, semua laporan keuangan yang dibuat desa melalui aplikasi SISKEUDES memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi, karena setiap laporan

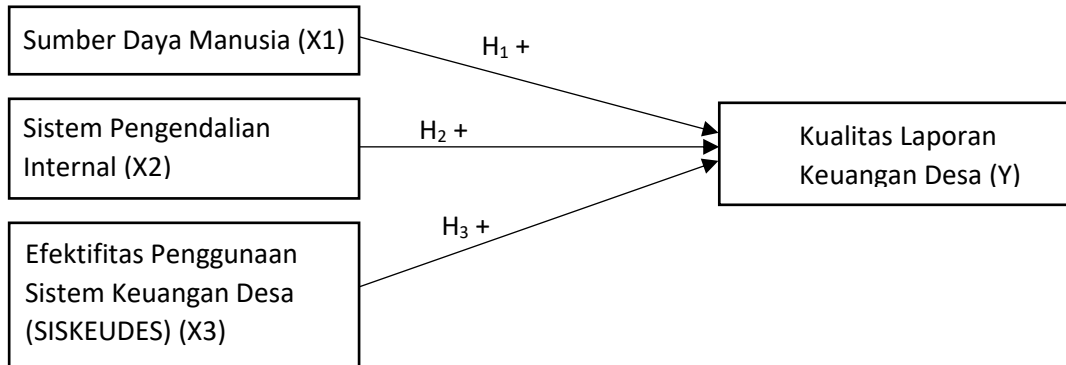
yang ditulis tidak mudah diubah, sehingga data yang dicantumkan harus sebenar-benarnya. SISKEUDES terhubung langsung ke pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah, provinsi atau pusat dapat dengan mudah mengakses atau memantau laporan keuangan desa dan dapat mengkompilasi laporan RAPBDesa di masing-masing wilayah yang memerlukan, yang kemudian data yang sudah dikompilasi tersebut menjadi laporan keuangan yang akan diaudit oleh BPK/Inspektorat.

Oleh sebab itu, penerapan SISKEUDES secara efektif sangat diperlukan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan desa. Pernyataan tersebut didukung dengan penelitian Dewi dan Mimba (2014) yang mengatakan tingkat efektifitas penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah di pemerintahan Kota Denpasar secara keseluruhan termasuk dalam kriteria efektif serta berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Menurut penelitian Mahaputra dan Putra (2014) pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah. Penelitian Yusup (2016) mengatakan bahwa aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Begitu juga menurut Gayatri dan Latrini (2018) yang mengatakan bahwa aplikasi SISKEUDES efektif untuk pengelolaan dana desa terhadap kualitas laporan keuangan desa.

H₃ : Penggunaan sistem keuangan desa (SISKEUDES) yang efektif berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan desa

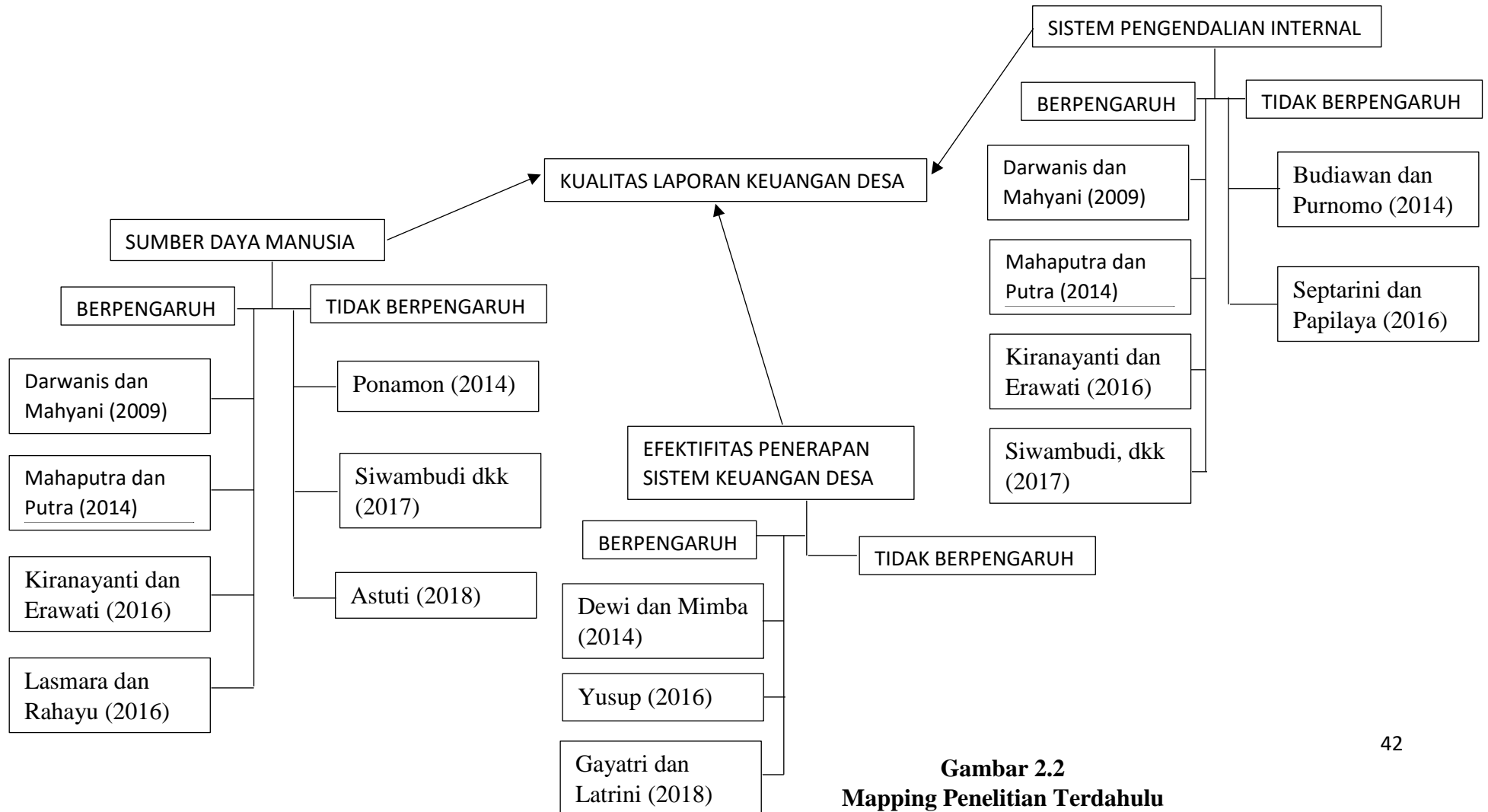
C. Model Penelitian



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian

D. MAPPING

PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN EFEKTIFITAS PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DESA (SURVEI PADA DESA DI KABUPATEN BANTUL)



Gambar 2.2
Mapping Penelitian Terdahulu

